



Sets the Standards and Beyond

# Global Minimum Tax and Potential Impact to Indonesian Tax Policies

Danny Septriadi S.E., M.Si., LL.M Int.Tax

# Curriculum Vitae

# Danny Septriadi, SE, MSi., LL.M Int.Tax

## Senior Partner



Danny Septriadi is one of the **World's Leading Transfer Pricing Advisers in 2015-2019** by Expert Guides. He is also selected as one of the **World's Leading Transfer Pricing Advisers 2020 & World's Leading Indirect Tax Advisers 2021** by International Tax Review, United Kingdom.

Master's degree in International Tax Law from Vienna University of Economics and Business Administration, Austria

### AWARDS & ACHIEVEMENTS:

- World's Leading Indirect Tax Advisers 2021 by ITR UK
- World's Leading Transfer Pricing Advisers 2020 by ITR UK
- Indonesian Transfer Pricing Leaders 2015-2019 by Expert Guides
- Experience as expert witness in Arbitration Disputes in London, United Kingdom
- Experience as expert witness in Indonesian District Court
- Experience as expert witness in Transfer Pricing in Indonesian Tax Court



Danny Septriadi is the author of several books (12 books).



# Global Consensus on Digital Tax

## Fokus Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital

Negara-negara G-20 sudah sepakat. Detail teknis difinalisasi Oktober 2021.  
Bagaimana posisi Indonesia?



Berita • Nasional

### DIGITALISASI EKONOMI Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional

Redaksi DDTCTimes | Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB



Berita • Nasional

### KEBIJAKAN PAJAK Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Redaksi DDTCTimes | Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB



Berita • Nasional

### KERANGKA PAJAK INTERNASIONAL Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Redaksi DDTCTimes | Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB



Berita • Perspektif

### PERSPEKTIF Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Berita, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB



Darussalam,  
Managing Partner DDTCT

SELAMA Juni-Juli lalu kita menyaksikan gelombang reformasi pajak internasional. Mayoritas negara anggota BEPS Inclusive Framework (IF) secara berturut-turut menegakan pajak minimum global.

Soal pajak minimum global tentu tidak dapat dilepaskan dari agenda mewujudkan K yang tahun lalu gagal tercapai. Walau berada dalam kerangka proposal pajak digital punya misi yang lebih besar. Hal itu ialah mengurangi kompetisi pajak, khususnya pada badan.

Secara sederhana atau setidaknya yang dipahami oleh banyak pihak, bakal ada tarif sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan kriteria tertentu, di manapun lokasi. Komitmen soal ini tinggal selangkah lagi difinalisasi di Oktober 2021.

Lantas, bagaimana cara kerja pajak minimum global tersebut? Bagaimana implikasi dan cara pandang Indonesia?

#### Pilar 2

PAJAK minimum global merupakan bagian dari proposal pajak digital yang disusun oleh OECD dengan dukungan dari G-20 terdiri atas dua pilar. Pajak minimum global, yang dibahas dalam tulisan ini, merupakan Pilar 2 dari proposal tersebut.

Kehadiran Pilar 2 bisa dianggap sebagai 'pelengkap' dari solusi pemajakan di era digital. Sebagaimana kita ketahui, pembangkit digital awalnya fokus pada upaya menemukan nexus baru yang menjamin hak pemajakan serta bagaimana mengalokasikan digital supaya lebih adil. Ini terbukti dari dokumen Aksi 1 Proyek BEPS (2015) hingga Laporan Interim (2018).

Baru pada 2019, muncul gagasan perlunya skenario lain yang secara bersama-sama dilakukan guna menjamin sistem pajak adil. Apa sebab? Penerapan Pilar 1 dirasa masih menyisakan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak. Khususnya koordinasi erat tentang preferensi kebijakan PPH badan tiap negara.

Review • Tajuk

### TAJUK PAJAK Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Redaksi DDTCTimes | Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB



# Global Minimum (Corporate) Tax



The OECD/G20  
Inclusive Framework  
on BEPS

Pillar 1

Pillar 2

Global Minimum  
Corporate Tax?

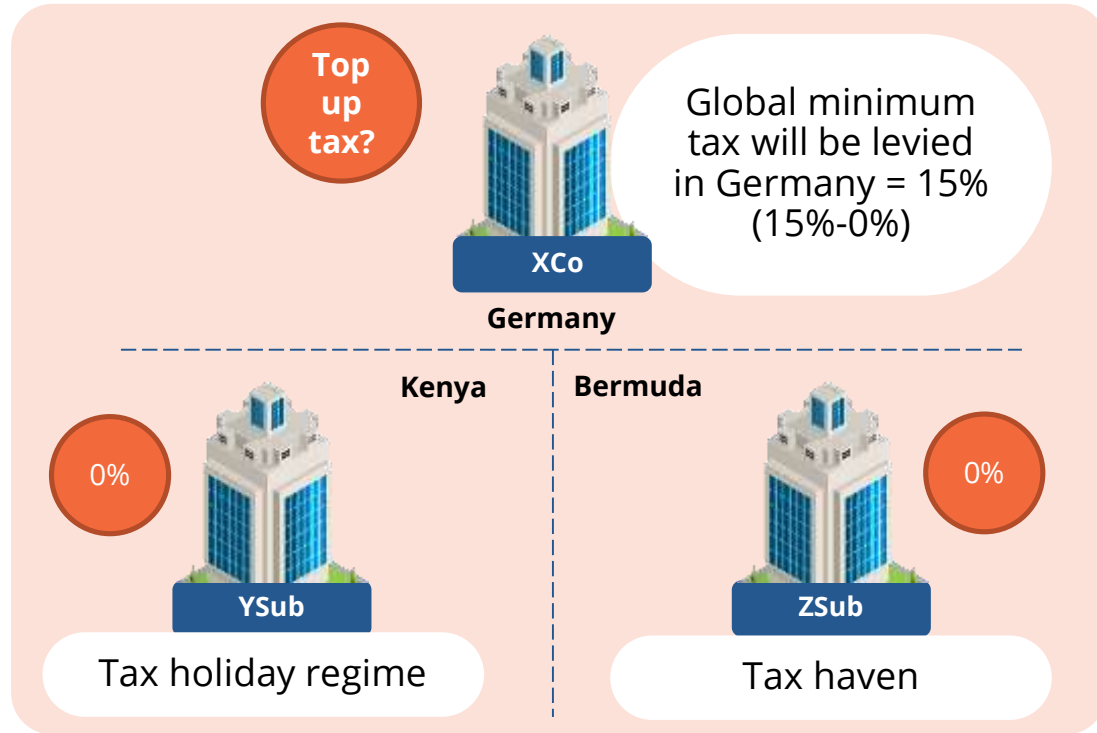
15%



- 1 Reducing the risk of BEPS practices for corporate income tax
- 2 Fair tax competition



# Fundamental Criticism



Inter-nation equity?

BEPS Action Plan 5

Harmful tax regime

Level playing field?

## Substance carve-out

1

Scope of substance carve-out on human resources and tangible assets

2

Formula-based approach

3

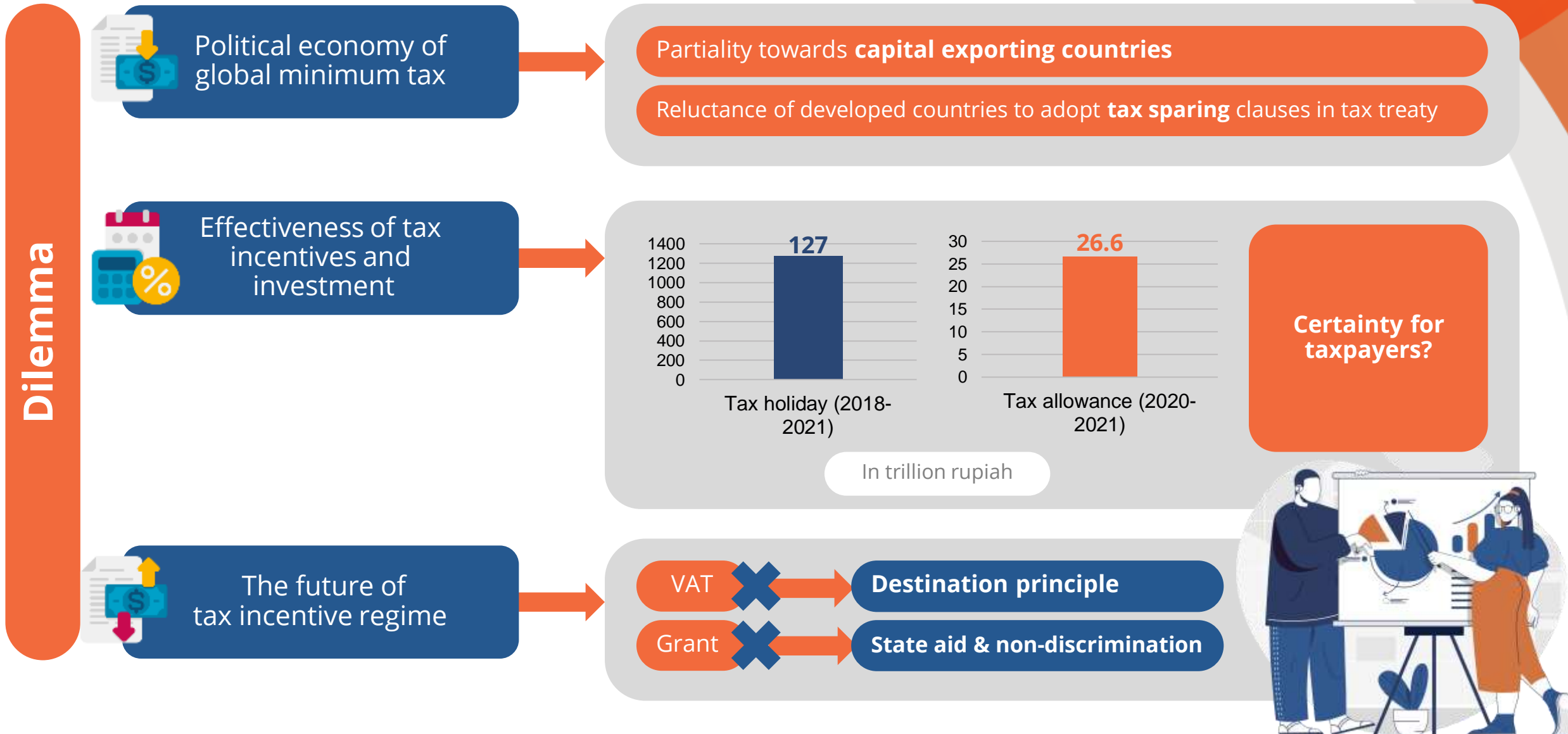
Consideration of rate 8% and 10% expenses



Stopping developing countries from implementing tax incentives would only serve to remove developing countries' response to tax competition – not the tax competition itself."

Avi-Yonah (2000)

# Dilemma for Indonesia



# Other Issues

1

## Impact on corporate tax design in Indonesia

- Semi-territorial tax system
- CFC rules
- Foreign tax credit
- Anti-avoidance rules
- Mapping and detailing information on MNEs

3

## Subject to tax rule (STTR)

- Withholding tax rate for services, royalties and interest income more than 9%
- To ensure subject to tax rules implemented via multilateral instrument

2

## Certainty for taxpayers

- Changing tax landscape
- Predictability and certainty for taxpayers in the new era of tax system: global minimum tax, the Harmonized Tax Law (HPP), the Fiscal Relations between Central Government & Regions (HKPD), and Job Creation Law (Ciptaker)



## Indonesia and the G20 Presidency in 2022:

Promoting the global tax landscape to provide fair competition

# Thank You

Follow us:



[ddtc.co.id](http://ddtc.co.id)



DDTC Indonesia



DDTC



@DDTCIndonesia

## Global & Domestic Recognition:



**Menara DDTC**

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B  
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading  
Jakarta Utara, 14240 - Indonesia

Phone: +6221 2938 2700  
Fax: +6221 29382699